

AMBIGUITAS POLITIK ULAMA-KIAI Antara Gerakan Moral dan Politik

Oleh:

Shokhibul Mighfar

Universitas Ibrahimy Situbondo

shokhibulmighfar17@gmail.com

Abstract:

The political process in Indonesia has experienced reform, and succeeded in overthrowing the political construction of the old regime which was monolithic authoritarian and militaristic while opening the way for the process of democratization and social transformation. Nowadays, the involvement of kyai as an actor in national politics has taken the attention of public and political observers. From the long history of the kyai's political stage, there has been a shift and change in direction, especially the shift from national politics to power politics. Kyai who initially moved on the cultural path, called the cultural broker, in the current political process seemed to be the actor who gave political legitimacy. The line of kyai's struggle began to shift along with political changes in the country. Kyai began to explore the political area of the party with all political maneuvers such as giving support (legitimacy) known as blessing. Politics is profane which necessitates the existence of tendencies, and consequently narrows down vision, mission and advocacy only to certain groups or mass of supporters. Necessarily, the legitimacy of kyai is not obtained through power and political supports but from his attitude and moral actions, in addition to the religious authority. So that going into politics does not further strengthen the prestige and charisma of kyai, but rather politicians' hegemony kyai.

Keyword: Political Performance, Politik Moral, Politik Kekuasaan

A. Pendahuluan

Dalam setiap perubahan sosial yang terjadi, sosok seorang kiai sering—jika tidak bisa dikatakan selalu—mengambil bagian penting perubahan itu. Praktik Kehidupan sosial di masyarakat dengan sosok Kiai ibarat dua sisi mata uang yang melekat satu dengan yang lainnya, dan tidak bisa dipisahkan. Dalam term ini seorang kiai memiliki tempat tersendiri serta power dalam struktur sosial dan budaya masyarakat, sehingga ia mampu mengubah dan bahkan berperan penting dalam memetakan kehidupan sosial masyarakatnya. Mengapa demikian?, karena

posisi seorang kiai di tengah-tengah struktur sosial kultural masyarakat adalah kelompok elite. Sehingga dalam pandangan masyarakat para kiai dianggap sebagai raja-raja lokal yang mampu menggerakkan dan mendinamisasi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya seorang kiai disanjung dan dihormati layaknya raja".¹

Senyatanya, sistem norma itu, bekerja secara efisien. Sesuai dengan konsep perbedaan dalam status sosial, dalam konteks ini, para kiai terutama di daerah-daerah pedesaan mereka menerima penghormatan lebih, yang tidak dimiliki oleh *elite* lokal yang lain.²

Sebagai pemegang otoritas keagamaan, otoritas dan kekuasaannya dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada hubungan sosial saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam dunia politik. Pengaruh seorang kiai tentu saja begitu luas---terutama dikalangan umat Islam--- yang sering mengikuti langkah-langkah politiknya. Keberhasilan kiai dalam memimpin masyarakat, menjadikannya semakin tampak sebagai orang yang berpengaruh, termasuk dalam ranah politik, sehingga mampu mempengaruhi dan menggerakkan aksi atau tanggapan emosional para pengikutnya.³

Seorang ulama, dituntut memiliki peran di segala bidang kehidupan. Dalam *bidang agama*, ulama bertugas penyampai risalah, penegak moral dan simbol agama. Dan di sisi lain juga berperan dalam bidang kehidupan yang bersifat *profan*; ekonomi sosial dan politik. Di kalangan ulama sunni begitu juga kiai-kiai di Indonesia melihat hubungan keduanya tidak saling terpisahkan.⁴

Endang Turmudi berpendapat bahwa kepemimpinan seorang kiai dalam aspek politik, sangat menarik untuk dicermati, sebab mampu

¹ Ibnu Hajar, *Kiai Di Tengah Pusaran Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2009), 17

² Penghormatan masyarakat terhadap kiai, biasanya ditunjukkan dengan sikap dan perilaku "mencium tangan kiai". Secara kultural, mengisaratkan penghormatan yang tinggi. Lebih dari itu, pada saat yang sama ia juga bertujuan untuk memperoleh barokah. Rasa hormat terhadap kiai, sebenarnya diperkuat oleh budaya masyarakat Indonesia.

³ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (LkiS Yogyakarta, 2003), 6.

⁴ Ada tiga kelompok dalam memandang hubungan Islam dan negara, pertama, 'blok kontra' yang melihat tidak ada hubungan antara agama dan negara (politik), kedua, 'blok pro', melihat ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara agama dan negara. Sedangkan kelompok terakhir, 'blok tengah' mencoba mencari titik temu diantara keduanya dengan berpandangan bahwa agama tidak secara tegas menganjurkan pembentukan negara. Namun agama secara substantif mengajarkan nilai-nilai etis, moral, dalam bernegara dan bermasyarakat. Lihat Idris Thoha, *Mendamaikan Agama dan Negara*, dalam Prof. Dr. Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, Merajut Kerukunan Antar Umat (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Cet. I., 2002), 7.

mengungkap pola patronase di masyarakat, sehingga terlihat jelas sentralitas kekuasaan.⁵ Munculnya anggapan bahwa seorang kiai memiliki otoritas dan kekuasaan di masyarakat, bukan isapan jempol belaka. Bahkan tidak hanya terbatas pada hubungan sosial saja, namun juga dibidang politik. Asumsi ini terbukti dengan adanya fakta kongkrit bahwa selama pelaksanaan pemilu, misalnya, partai peserta pemilu coba memanfaatkan kiai untuk meningkatkan perolehan suara mereka. Pengaruh kiai ini tentu begitu jelas dikalangan umat Islam saleh yang sering mengikuti langkah politik kiai".⁶

Kekuatan pengaruh yang dimiliki oleh para kiai sering "dimanfaatkan" oleh para politisi untuk mengisi lumbung suaranya, Hal ini disadari betul oleh para politisi bahwa masyarakat sangat patuh dengan kiai dengan model kepemimpinan kharismatik seperti ini. Dalam kajian ilmiah, Abdul Muqit juga menjelaskan bahwa seorang kiai menjadi tokoh sentral yang mempunyai kekuasaan penuh dipesantren; yang kharismanya menjadi panutan bagi santri dan alumni. Inilah yang dibaca oleh politisi sebagai peluang untuk mengambil manfaat dalam politik kekuasaan⁷.

Terlebih setelah kekuasaan Soeharto sebagai presiden tumbang, dan masa reformasi mulai bergulir, maka banyak partai yang mengusung azas islam sebagai platform dan landasan ideologisnya. Dan mendekati serta menjadikan kiai kharismatik sebagai "vote getter" adalah merupakan strategi kampanye politik yang strategis dan menggiurkan serta efektif dan efisien untuk mengisi lumbung suara partainya. Apalagi kondisi yang seperti ini sering dan kurang disadari oleh seorang kiai bahwa ada pembonceng dalam setiap aktivitas kiai dalam menyebarkan luaskan (berdakwah) ajaran islam.

Tentu terasa sulit untuk dihindari adanya upaya "memanfaatkan"

⁵ Dalam kultur masyarakat santri, kiai menjadi patron sedangkan masyarakat sebagai klien. Pertukaran yang kemudian terjadi dapat berupa pengetahuan agama, tuntunan, panutan dan perlindungan yang diberikan oleh kiai pada masyarakat yang dibalas dengan kepercayaan, kesetiaan dan dukungan. Tuntunan hidup yang diberikan kiai bisa berupa petunjuk menjalankan agama sesuai dengan ajaran yang diyakini kebenarannya dan nasehat-nasehat. Tapi, tuntunan dan nasehat itu tidak terbatas pada hubungan keagamaan saja, melainkan bisa meluas ke hubungan sosial hingga politik. Lihat: Almas Ghalia Putri Sjafrina, "Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah" (Studi Kasus Patronase Pencalonan ra. Imam – Din Zein Dalam Pilkada Bangkalan 2012) dalam "Jurnal Politik Muda", Unair Surabaya Vol. 2. No. 1 /2013.

⁶ Endang Turmudi, *ibid*, 246.

⁷ Abd. Muqit, *Profesionalisme Kiai dalam Pengelolaan Pondok Pesantren dalam Konteks Kemodernan*. JPII, Vol. 2, No. 2, 2018, 145.

model kepemimpinan kiai kharismatik seperti ini, yang biasanya terdapat di pesantren-pesantren, surau, dayah dan lain sebagainya oleh para politisi baik yang partainya mengusung azas islam maupun nasionalis (*pragmatism*). Bahkan saat ini muncul trend baru dalam politik di Indonesia, bahwa semakin sulit memisahkan partai politik yang berazas islam dengan yang nasionalis. Atau istilah yang mengmuka adalah instegrasi nasionalis dengan agamis.

Kondisi semacam ini sering menjebak dan tidak disadari oleh para kiai, yang pada akhirnya sejumlah kiai merasa sangat penting untuk ikut ambil bagian dengan terjun langsung dalam permainan politik tanah air. Partai politik yang smart dan jeli melihat peluang ini, tanpa ragu dan bimbang mencoba memanfaatkan peluang ini baik ditingkat nasional maupun daerah dan lokal dalam setiap pelaksanaan pemilu. Alhasil, kehidupan politik praktis yang sarat dengan kepentingan dan ketidakpastian, juga harus dihadapi oleh kiai yang dalam keseharian selalu menekankan kejujuran dan kepastian sebagai bagian dari akhlakul karimah yang selalu diajarkan dan dicontohkan.

Keintiman kiai dalam dunia politik sebenarnya tidak hanya terjadi saat ini saja, namun dalam rentang sejarah Indonesia sebagai negara bangsa peran dan andil para kiai sangat besar dan penting dalam mempersiapkan kemerdekaan NKRI dan era pasca-kemerdekaan. Tidak hanya pada saat persiapan kemerdekaan saja, para kiai juga mampu menorehkan tinta emas dan membanggakan dalam perpolitikan nasional de era Soekarno. Para kiai dengan kekuatan sosial kulturalnya mampu berperan sebagai oposisi pada pemerintahan Bung Karno, ini dilakukan sebagai bentuk balancing terhadap dominasi kekuasaan pemerintah saat itu yang lebih miring dan dekat dengan golongan komunisme. Dengan adanya para kiai yang terjun langsung dalam kancah perpolitikan nasional, ternyata cukup efektif untuk membendung komunisme, bahkan yang perlu diapresiasi adalah dibentuknya kementerian penghubung pesantren dan ulama

Untuk itu juga, tulisan ini mencoba memotret hubungan kiai dengan situasi sosial dan politik. Terlebih dengan kian maraknya figur kiai yang akan dan telah melibatkan diri di arena politik praktis. Adapun bidikan penulis, lebih fokus pada perspektif ilmu-ilmu sosial. Keterlibatan mereka dalam dunia yang sering di sebut wilayah "abu-abu" itu, menjadi menarik bukan hanya untuk diperbincangkan tetapi juga untuk dipertanyakan karena posisinya yang ambigu; "Gerakan moral, atau Politik?" dua pertanyaan bertolak belakang di atas, masih menunggu jawaban atas kian banyaknya pemuka agama yang merangkap jabatan.

Sebagai kiai *plus* politisi.

B. Memahami Definisi Kiai dan Politik

Meminjam istilahnya KH. Cholil Bisri,⁸ Seseorang yang dikatakan atau mendapat julukan sebagai *kiai* adalah orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai orang yang *alim*.

Dalam al-Qur'an, *alim* yang berjamak *alimun* ialah orang yang punya kelebihan ilmu dan memiliki kadar kecerdasan yang dengannya ia mampu mengeluarkan hujjah berupa ayat-ayat Allah dan lebih mengedepankan performance keilmuwan sebagai orang yang berilmu (*alim*). Adapun yang berjamak *ulama'*, adalah orang yang dengan keyakinannya merasa malu untuk berbuat yang membias dari rasa kehambaan.⁹

Horikoshi membuat perbedaan dalam penggunaan istilah "kiai" dan "ulama". Perbedaan ini lebih dikarenakan fungsi yang diperankannya secara formal. Untuk istilah 'Ulama' lebih memerankan fungsi-fungsi administratif, sedangkan istilah 'kiai' lebih cenderung berada pada tataran kultural. Dengan argumentasi ini, kita dapat mengetahui apa sesungguhnya yang melatarbelakangi penggunaan istilah dalam organisasi formal komunitas orang yang memiliki ilmu agama di Indonesia, yakni menggunakan istilah "ulama", yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan Majelis Kiai Indonesia.¹⁰

Inilah kemudian yang mendasari tulisan ini, sengaja memilih istilah "kiai", bukan istilah "ulama". Hal ini dimaksudkan bahwa dalam analisisnya akan lebih menekankan pada aspek kultural dari potret hidup seorang figur sosial yang disebut kiai. Lebih tepatnya lagi adalah untuk melihat perannya yang berfungsi social politik sebagaimana dalam judul tulisan ini.

Muhammad Fuad Abd al-Baqi,¹¹ berpendapat bahwa term ulama (baca kiai), termaktub dalam al-Qur'an secara eksplisit dua kali disebutkan. *Pertama*, dalam surat al-Syu'ara ayat-197.

⁸ M. Cholil Bisri, *Ketika Nurani Bicara*, (Jakarta: Remaja Rosda karya, 2000), 85.

⁹ Seyyed Hossein Nasr dalam Deden Makbuloh, "Globalisasi dan Dinamika Masyarakat Muslim" *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 26, No. 2, Desember 2008., 110, lihat Abdurrahman' "*Fenomena Kiai Dalam Dinamika Politik*" dalam jurnal Karsa vol xv. no. 1 april 2009

¹⁰ Hiroko Horikoshi. "*Kiai dan Perubahan Sosial*". Jakarta: LP3ES, 1987.

¹¹ Muhammad Fuad Abd al-Baqi dalam Dzarrin al-Hamidy, "*Peran Ulama dalam Pemberdayaan Generasi Muda*" *Majalah Aula*, September 2008., 83-84.

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

"Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?" [al-Syu'ara: 197]

Yang Kedua, surat Fatir, ayat-28.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

"Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun" [al-Fatir: 28]

Sementara Nurcholis Madjid, memberi pengertian kiai dalam pandangan masyarakat secara umum dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu keagamaan bila dibandingkan dengan orang lain pada umumnya.¹²

Sesungguhnya, atribut keulamaan itu disematkan kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang dengan semangat ilmunya mereka dapat mengetahui dan memahami kebesaran dan kekuasaan Allah.¹³ Belum lagi kiai dari terjemahan *alladîna ûtû al-ilma, ulû al-ilmi*, dan *al-râsikhûna fî al-ilmi* (mempraktikkan, menjaga, memiliki).

Sebutan istilah kiai dalam masyarakat juga sangat beragam diantaranya adalah; kiai pondok pesantren, kiai masjid, kiai mimbar, kiai selebritis, kiai pers, dan akhir-akhir ini dikenal juga sebutan kiai politik.¹⁴ Tidak heran kalau beberapa kalangan "*cemburu*" kepada kiai. Dalam konteks kiai politik, dikenal juga sebutan; kiai sepuh, kiai *khos*, serta

¹² Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 2002), 96.

¹³ Melihat paparan di atas mengenai ilmu yang menjadi prasyarat seseorang untuk bisa disebut Ulama, tidak ada yang menguatkan harus "ilmu agama" atau "ilmu umum" yang terpenting ilmu itu harus membawa perubahan kearah yang lebih baik, terlebih bagi diri yang bersangkutan, dan bagi masyarakat umum, serta semakin menambah kualitas ketaqwaan kepada sang Pencipta. Jiwa keulamaan itu terpatri dalam figur seseorang yang memiliki integritas antara ilmu dan amalnya, antara teori yang dikuasai, dengan praktik keseharian. Lihat Muhammad Fuad Abd al-Baqi dalam Dzarrin al-Hamidy, "*Peran Ulama...85*

¹⁴ Sebutan kiai politik, mengindikasikan keterlibatan seorang kiai dalam dunia politik, (di eksekutif, legislatif, dan di partai politik)

sebutan kiai lain yang kedengarannya menarik. Karena posisinya sebagai patron dimasyarakat, realitas telah menunjukkan, dengan menjadi seorang kiai telah banyak peran yang dapat dimainkan.¹⁵

Horikoshi (1978),¹⁶ misalnya, menyebutkan bahwa kekuatan kiai sebagai motor perubahan sosial bukan hanya pada masyarakat lingkungan pesantren, tetapi juga pada masyarakat umum di sekitarnya. Sementara Geertz (1960)¹⁷ menyebut kiai sebagai makelar budaya (*cultural brokers*) dan menyatakan bahwa pengaruh kiai itu terletak pada implementasi fungsi makelar ini. Sosok seorang kiai terbukti secara sosial mampu mengomunikasikan berbagai kepentingan dengan kemampuan bahasanya, meskipun secara politis kiai dapat dikategorikan sebagai figur yang sedikit pengalaman dan terbatasnya kemampuan professional.

Kata *politik*, dijelaskan Abdul Mu'in Salim dalam buku *Fiqih Siyāsah*, berasal dari bahasa latin *politicus*, dan bahasa Yunani (*greek*), *politicus* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata ini, berasal dari kata *polis* yang bermakna *city*. Politik kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu; (1) segala yang berkaitan dengan tindakan, kebijaksanaan, *siyāsah*, dsb, (2) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, (3) dipergunakan sebagai nama bagi semua disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu politik.¹⁸

Politik dalam KBBI elektronik (Kamus Besar Bahasa Indonesia) v.1.3 disebutkan bahwa politik adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (spt tt sistem pemerintahan, dasar pemerintahan).¹⁹

Sementara dalam ensiklopedi dijelaskan bahwa, politik adalah sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan dan lembaga-lembaga. Proses-proses dalam politik bisa jadi merupakan kegiatan individu maupun kelompok yang bersangkutan dengan hubungan kemanusiaan secara mendasar.²⁰

C. Membaca Peran Kiai dalam Negara Bangsa (Antara Gerakan Moral dan Politik)

¹⁵ Mohammad Kosim, "Kiai dan Blater" (*Elite Lokal dalam Masyarakat Madura*). Dalam *Karsa Jurnal Studi Keislaman* Vol. XII No. 2 Oktober 2007, 163.

¹⁶ Hiroko Horikoshi. "Kiai dan Perubahan Sosial". Jakarta: LP3ES, 1987.

¹⁷ Clifford Geertz, *Culture, Custom and Ethnics* (England: Polity Press, 2000), 43

¹⁸ Abdul Mu'in Salim, *Fiqih Siyāsah*: "konsepsi kekuasaan politik dalam al-qur'an". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), cet ke-I. 34.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) v1.3.

²⁰ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtar Baru, 1984). 2739.

Proses politik di Indonesia pernah mengalami reformasi, dan ini berhasil merobohkan konstruksi politik rezim lama yang bersifat *monolitik otoriter* dan *militeristik* sekaligus membuka jalan bagi berlangsungnya proses demokratisasi dan transformasi sosial. Proses ini juga lazim disebut sebagai transisi demokrasi. Starting poinnya adalah peristiwa pemakzulan presiden Soeharto pada bulan Mei 1998 dari puncak kekuasaan.

Reformasi sendiri adalah merupakan bagian dari transisi demokrasi yang di dalamnya mencakup liberalisasi politik dan demokratisasi. Dalam tahap ini, rezim mengalami perubahan dan hak-hak politik rakyat semakin meluas. Pergantian pemerintahan melalui pemilu yang demokratis pun dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi politik rakyat. Guilermo O'Donnel dan Philippe C. Schmitter²¹ mengungkapkan, tidak jarang transisi demokrasi menimbulkan situasi yang tidak pasti. Ketidakpastian ini dalam beberapa kasus dapat memicu peluang munculnya kekuatan status quo, maupun gerakan-gerakan arus balik demokratisasi.

Transisi demokrasi menimbulkan perubahan besar dalam pusaran kekuasaan. Kekuasaan beralih ke tangan politisi sipil yang awalnya berada dalam "genggaman" militer. Bagi institusi partai, perubahan ini membawa implikasi yang sangat berarti. Perubahan yang tertuang di dalam amandemen UUD 1945, tentang Lembaga-lembaga kenegaraan, justru menempatkan partai menjadi sebuah institusi penting dan sangat strategis dalam struktur politik Indonesia. Namun sekaligus juga berarti menjadi ancaman serius bagi partai politik jika ia gagal dalam mengawal demokrasi di negeri ini.

Kegagalan dalam transisi demokrasi mengakibatkan tiga hal²²: *pertama*, munculnya kembali kekuatan lama dalam panggung kekuasaan. Prosesnya bisa berlangsung secara sistematis, baik melalui jalur demokrasi atau bahkan melalui kekerasan seperti kudeta militer. Jalur demokrasi akan ditempuh jika kelompok pembaharu demokrasi tidak mengawal secara tuntas proses demokrasi itu sendiri, dan memberi kesempatan bagi status quo melakukan konsolidasi, *mutasi* politik dan *political laundry*.

Dewasa ini, keterlibatan 'kiai' sebagai aktor perpolitikan nasional, sudah cukup banyak menyita perhatian publik dan para pengamat politik.

²¹ Proses transisi demokrasi dapat dibaca pada; Guilermo O'Donnel and Philippe C. Schmitter. *Transitions From Authoritarian Rule; Tentative Conclusions About Uncertain Democracies*. Baltimore; John Hopkins University Press, 1986.

²² Ichwan Ar. *Jalan Baru Pergerakan Kebangsaan*, Buletin *Praksis*, Edisi 04, Mei 2006

Mengapa demikian? Karena cara berpolitik 'kaum sarungan' ini dilihat dan dinilai cukup memiliki aura politik yang unik. Sekali tempo kiai tampil garang, toleran, lugu, dan tidak sedikit yang penurut, karena pada saat itu kiai sedang memerankan *political performance*.

Ending pertunjukan politik kiai juga sulit diprediksi dan ditebak secara politik. Seringkali argument, nalar dan kaidah ilmu politik tidak mampu menjangkau kemana arah sikap politik kiai. Hal ini wajar, karena dalam memahami sikap politik kiai tidak bisa dilepaskan dari kultur, nalar syari'ah dan sufisme seorang kiai. Ketiga ranah ini selalu luput dari nalar dan kaidah ilmu politik, yang selama ini dijadikan dasar pijakan dalam memahami peristiwa politik oleh para pengamat politik.

Dari sekian lama perjalanan sejarah pentas politik kiai, terjadi pergeseran dan perubahan arah, terutama pergeseran dari politik kebangsaan ke politik kekuasaan. Politik kebangsaan yang pernah dimainkan atau disebut tiga ranah fiqh politik adalah, yaitu ketika (1) Gerakan politik yang dicetuskan melalui resolusi jihad, (2) Menuntut pembubaran PKI, dan (3) Penerimaan asas Pancasila.²³

Dinamika dan proses politik yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama menjelang ajang Pilkada, Pileg, Pilgub sampai dengan Pilpres mengalami perubahan yang amat drastis. Aktor politik yang biasanya dilakukan oleh kalangan umum dan profesional sekarang ini mengalami pergeseran, terutama dengan adanya aktor lain dari dunia. Aktor lain itu adalah kiai sosok yang selama ini dikenal hidup di tengah-tengah santri dan masyarakat.

Kiai yang pada awalnya bergerak di jalur kultural, yang dalam bahasa Clifford Geertz (1981) disebut *cultural broker* (makelar budaya),²⁴ di tengah arus proses politik yang terjadi sekarang ini seakan menjadi aktor pemberi legitimasi politik. Garis perjuangan kiai mulai bergeser seiring dengan perubahan politik di tanah air. Kiai pun mulai merambah wilayah politik partisan dengan segala manuver politik dukung-mendukung (legitimasi) yang seringkali dinamai dengan istilah memberi restu atau silaturrahim.

Proses ini karena adanya simbiosis mutualisme untuk *interest* tertentu demi mendapatkan bagian dari kekuasaan atau minimal mendapatkan bantuan dari elit politik yang didukung untuk lembaga baik

²³ Faisal Ismail menyebut politik kebangsaan ini sebagai "tiga momentum historis gerakan strategis NU," lihat, *NU Gusdurisme dan Politik Kyai*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), 11-17

²⁴ Clifford Geertz, *Culture, Custom and Ethnics* (England: Polity Press, 2000), 43

formal maupun non formal yang dipimpin. Sementara elit politik akan mendapatkan legitimasi moral keagamaan dari kiai sebagai bahan kampanye. Dalam politik praktis, kiai memberikan legitimasi pada elit politik dengan memakai agama, karena agama adalah energi dahsyat yang mampu menyublimasikan dan mensakralkan dunia profan.

Peter L. Berger (1991), agama adalah langit suci (*the sacred canopy*)²⁵ yang dapat dijadikan instrumen memperkokoh politik dari seluruh tindakan manusia. Kiai tidak saja merupakan pimpinan pesantren tetapi juga memiliki power di tengah-tengah masyarakat, bahkan memiliki prestis di kalangan masyarakat (Geertz, 1981).

Meminjam analisis Max Weber (1968), kepemimpinan tokoh agama sesungguhnya adalah kepemimpinan kharismatik yang berporos pada personal leadership. Dalam konteks ini ulama adalah patron bagi umatnya (*client*) dalam sebuah relasi yang paternalistik. Kompetensi Kiai dalam bidang agama menempatkannya sebagai pemegang otoritas suci agama. Fatwa dan nasehat Kiai senantiasa dijadikan sebagai preferensi sosial-politik yang dipatuhi umatnya. Dengan otoritas kuasa dan moral yang dimilikinya, kiai mampu menggerakkan masyarakat dalam menentukan pilihan politik, tak heran dalam setiap ajang pesta demokrasi, kiai selalu dimanfaatkan untuk menjadi *leader vote getter*.

Hampir semua kiai digolongkan sebagai "penjaga umat" sekaligus basis kekuatan moral. Namun kini, tampilnya kiai dalam pentas politik untuk dukung mendukung sudah bukan barang asing lagi. Peran para kiai dalam pesta demokrasi sudah secara 'berjamaah' berduyun-duyun memberikan dukungan politiknya kepada calon-calon pemimpin sesuai panatik dan *kong kalikong* masing-masing.

Gejala perilaku kiai berpolitik ini sebenarnya lebih bersumber pada ketinggalan dalam mengakses jalur ekonomi yang membuat banyak kiai mengalami kesulitan menutup biaya operasional pesantren yang harus meningkat. Hal ini diperparah dengan sikap apatis pemerintah setempat terhadap kesulitan yang dihadapi pesantren. Tak heran, para kiai kemudian menghadapi dilemma membiarkan pesantren merana atau mencari sumber dana baru.

Di titik inilah persinggungan elit politik, agama dan kiai seringkali terjadi. Situasi demikian sebenarnya diasumsikan bisa menghilangkan kesakralan kiai. Jika kiai yang ikut dalam arus politik dukung mendukung

²⁵ Peter L. Berger, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (1966, dengan Thomas Luckmann) (bahasa Indonesia: *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, LP3ES, Jakarta, 1990), 67.

dikhawatirkan akan terjebak pada logika kekuasaan politik (*the logic of politics power*) dengan memanipulasi umat dan masyarakat demi kepentingan politik sesaat, yang pada gilirannya menggiring kiai sebagai agen yang cenderung kooptatif, hegemonik, dan korupsi.

Akibatnya, nilai moral yang mengedepankan ketulusan pengabdian akan tereduksi atau bahkan hilang sama sekali, terkalahkan oleh logika kekuasaan politik. Secara kewibawaan, kiai yang terlibat langsung dalam politik partisan jelas akan merugi. Sebab, kiai bisa dianggap "*belepotan lumpur*" politik. Petuahnya tidak lagi diikuti masyarakat. Sebagai panutan, jelas akan semakin kehilangan jamaah hanya karena kepentingan pragmatis semata.

Sementara politik bersifat profan yang meniscayakan adanya kepamrihan, tendensius, dan akibatnya mempersempit visi-misi dakwah serta advokasi kiai hanya pada kelompok tertentu, yaitu massa pendukungnya. Dengan aktif berpolitik, pesantren, santri, dan masyarakat kian terbengkalai lantaran para kiainya telah hijrah ke alam politik praktis dan terlena dalam buaian elite politik demi *gold, gospel, and glory*. Seharusnya, legitimasi kiai bukan diperoleh lewat jalur kekuasaan, politik dukung-mendukung elit politik namun dari sikap dan tindakan moralnya, di samping otoritas keagamaan yang dimilikinya. Sehingga terjun ke politik partisan bukan semakin meneguhkan pamor dan karisma kiai, tetapi sebaliknya, justru kiai yang dihegemoni oleh para politisi.

Pada gilirannya, simbol kiai yang sakral dan sangat dihormati oleh umat menjadi hilang begitu saja karena terlibat dalam permainan politik. Moral Politik kiai sebenarnya punya beberapa peran, yakni sebagai pemuka agama, konsultan sosial, dan politik. Sebagai pemuka agama kiai bertindak sebagai pemimpin ibadah (shalat, doa, zakat, puasa), dan pemberi fatwa keagamaan. Sebagai konsultan sosial, ia dijadikan tempat bertanya pengikutnya untuk meminta nasihat, minta penyembuhan, dan sebagai orang yang dituakan. Dalam politik, ia akan memainkan peran moral yang terkait dengan kepentingan umum ke berbagai saluran politik, baik langsung maupun tidak langsung.

Inilah seharusnya peran politik kiai untuk dijadikan landasan dalam kerangka menjadi "penjaga umat" dan *agent of change* dari setting sosial, budaya dan politik yang tidak sesuai dengan kultur dan moralitas keagamaan. Nantinya politik kiai bukan berorientasi pada kekuasaan, tapi politik moral. Keterlibatan kiai dalam politik bukan berarti terjun dan turut terlibat langsung dukung-mendukung Capres dan laga pesta demokrasi lainnya. kiai tetap boleh berpolitik, tetapi tidak diorientasikan pada kekuasaan, melainkan menanamkan nilai-nilai moral untuk

penguatan umat dan masyarakat.

Sebagai pewaris nabi dan orang yang tertanam akarnya di masyarakat, para kiai dengan semestinya memainkan diri sebagai figur moral, anutan publik, menjadi suri tauladan serta sebagai kekuatan cultural yang selalu mengingatkan para pemimpin, sekaligus menegaskan perannya untuk secara etis-profetik mengawal kepentingan umat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fungsi-fungsi seperti itu, maka peran kiai sebagai *soko bumi* kehidupan masyarakat.

D. Simpulan

Dari paparan di atas, kesimpulan penting yang dapat diambil adalah bahwa peran kiai dalam politik harus di dudukkan secara proporsional, bahwa kiai sebagai 'penjaga ummat' semestinya memainkan diri sebagai figur moral, anutan publik, menjadi suri tauladan serta sebagai kekuatan cultural yang selalu mengingatkan para pemimpin, sekaligus menegaskan perannya untuk secara etis-profetik mengawal kepentingan umat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ranah politik di dalamnya. [*Wa Allāh a'lam bi al-sawāb*]

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. dalam Dzarrin al-Hamidy, *Peran Ulama dalam Pemberdayaan Generasi Muda*. Majalah Aula, September 2008., 83-84.
- Abdurrahman' *Fenomena Kiai Dalam Dinamika Politik*. Karsa Vol XV. No. 1 April 2009.
- Azra, Azyumardi. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, "Merajut Kerukunan Antar Umat. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Cet. I., 2002
- Bisri, M. Cholil. *Ketika Nurani Bicara*. Jakarta: Remaja Rosda karya, 2000.
- Clifford Geertz, *Culture, Custom and Ethnics*. England: Polity Press, 2000.
- Hajar, Ibnu. *Kiai Di Tengah Pusaran Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2009.
- Horikoshi, Hiroko. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Ichwan Ar. *Jalan Baru Pergerakan Kebangsaan*, Buletin *Praksis*, Edisi 04, Mei 2006
- Ismail, Faisal *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*. Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) v1.3.
- Kosim, Mohammad. "*Kiai dan Blater*" (*Elite Lokal dalam Masyarakat*

- Madura). Dalam *Karsa Jurnal Studi Keislaman* Vol. XII No. 2 Oktober 2007
- Madjid, Nurcholis. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Makbuloh, Deden. "Globalisasi dan Dinamika Masyarakat Muslim" *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 26, No. 2, Desember 2008 .
- Maliki, Zainuddin. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: UGM press, Januari 2012.
- Muqit, Abd. *Profesionalisme Kiai dalam Pengelolaan Pondok Pesantren dalam Konteks Kemodernan*. JPPII, Vol. 2, No. 2, 2018, 145.
- O'Donnel, Guilermo and Schmitter, Philippe C.. *Transitions From Authoritarian Rule; Tentative Conclusions About Uncertain Democracies*". Baltimore; John Hopkins University Press, 1986.
- Peter L. Berger, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. 1966, dengan Thomas Luckmann) (bahasa Indonesia: *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Putri Sjafrina, Almas Ghalia, *Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah: Studi Kasus Patronase Pencalonan ra. Imam – Din Zein Dalam Pilkada Bangkalan 2012* dalam "Jurnal Politik Muda", Unair Surabaya Vol. 2. No. 1 /2013.
- Salim, Abdul Mu'in. *Fiqih Siyāsah: "Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-qur'an"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. cet ke-I.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1984.
- Turmudi, Endang. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, LkiS Yogyakarta, 2003.

"Ambiguitas Politik Kiai"



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IBRAHIMY SITUBONDO